

**FORMULASI PERATURAN NAGARI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI BERBASIS DATA
PRESISI DI NAGARI PANAMPUANG AMPEK ANGKEK AGAM**

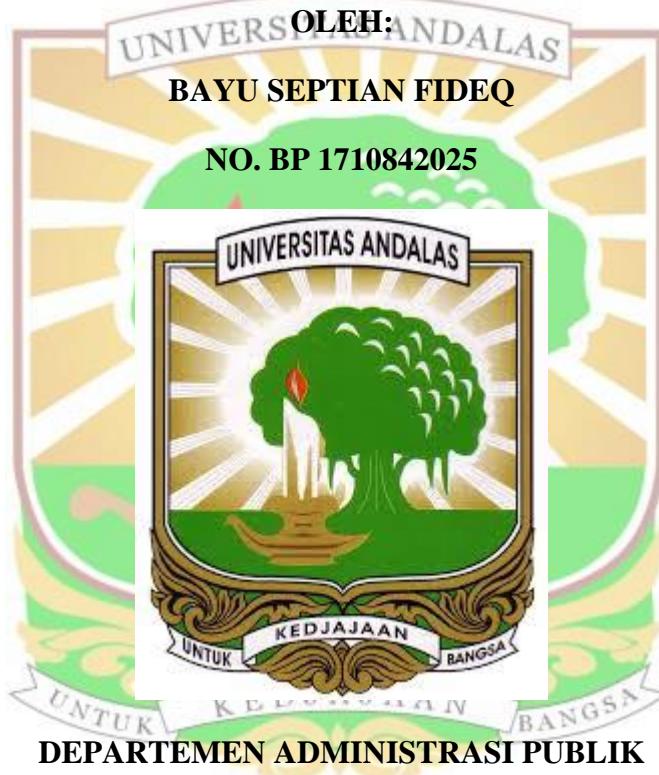
SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH:

BAYU SEPTIAN FIDEQ

NO. BP 1710842025



DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

Bayu Septian Fideq, 1710842025, Formulasi Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Berbasis Data Presisi Di Nagari Panampuang Ampek Angkek Agam. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2024. Dibimbing oleh : Kusdarini, S.IP, M.AP dan Nila Wahyuni, S.AP, M.AP

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh empat permasalahan utama yang dihadapi Nagari Panampuang tidak memiliki peta visual yang menggambarkan secara utuh sumberdaya desa. Permasalahan infrastruktur menyebabkan beberapa hal diantaranya bencana banjir, longsor serta penurunan aktifitas pariwisata. Pada aspek kesehatan masyarakat ditimbulkan oleh sebagian masyarakat yang belum melengkapi data kependudukannya sehingga menghambat terdistribusinya akses kesehatan. Pada permasalahan pendapatan petani seringkali masyarakat mengantre untuk mendapatkan irigasi dengan sistem buka tutup saluran. Selanjutnya, akses pendidikan yang berkualitas, masih menjadi pembicaraan yang hangat di Nagari Panampuang diakibatkan oleh honor guru yang terbilang minim sehingga kerja –kerja pendidikan formal masih kurang diminati

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori konseptual Formulasi Kebijakan Publik Siklus Pendek menurut Ripley. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan proses formulasi ini dimulai dari *agenda setting* dan kemudian tahap formulasi dan legitimasi

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam perumusan rancangan peraturan Nagari Panampuang ini bersumber dari inisiatif Pemerintah Nagari Panampuang yang merupakan cita-cita dari Walinagari itu sendiri yang dijembatani oleh FEMA IPB dan juga PUSAKO UNAND. Pada tahap *Agenda Setting* proses perumusan Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Berbasis Data Presisi tidak ada permasalahan dari masyarakat untuk memasukan kedalam isu-isu masalah publik menjadi agenda pemerintah. Pada tahap Formulasi dan Legitimasi kebijakan ini ditetapkan melalui proses yang panjang dimana rancangan peraturan diinisiasi oleh pemerintah Nagari kemudian melakukan perundingan pembuatan peraturan ini didukung dan didampingi Pusat Kajian Konstitusi Unand sementara kritik dan sarannya dilakukan di tahap Nagari saja.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Berbasis Data Presisi

ABSTRACT

Bayu Septian Fideq, 1710842025, Formulation of Nagari Regulation Number 2 of 2023 concerning Precision Data-Based Nagari Government Administration System in Nagari Panampuang Ampek Angkek Agam. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Padang, 2024. Supervised by: Kusdarini, S.IP, M.AP and Nila Wahyuni, S.AP, M.AP.

This research is motivated by four main problems faced related to village development, namely covering aspects of education, farmer income, health and infrastructure, and also Nagari Panampuang does not have a visual map that fully describes village resources. Infrastructure problems cause several things including floods, landslides and a decrease in tourism activities. In the aspect of public health, it is caused by some people who have not completed their population data, thus hampering the distribution of health access. On the issue of farmers' income, people often queue to get irrigation with an open and close channel system. Furthermore, access to quality education is still a hot topic in Nagari Panampuang due to the minimal teacher honorarium so that formal education work is still less desirable.

The method used in this research is descriptive qualitative. The data collection techniques used in this research are interviews, observation, and documentation. This research uses the conceptual theory of Short Cycle Public Policy Formulation according to Ripley. Based on the theory that researchers use, this formulation process starts from agenda setting and then the formulation and legitimization stages.

The results of this study found that the formulation of the draft regulation of Nagari Panampuang originated from the initiative of the Panampuang Nagari Government which was the ideal of the Walinagari himself who was bridged by FEMA IPB and also PUSAKO UNAND. At the Agenda Setting stage, the formulation process of the Panampuang Nagari Regulation Number 2 of 2023 concerning the Precision Data-Based Nagari Government Implementation System in Nagari Panampuang Ampek Angek Agam has no problems from the community to include public issues into the government agenda. At the Formulation and Legitimacy stages this policy is determined through a long process where the draft regulation is initiated by the Nagari government then negotiates the making of this regulation supported and accompanied by the Unand Center for Constitutional Studies while criticism and sarhanya are carried out at the Nagari stage only.

Keywords: Policy Formulation, Precision Data-Based Nagari Government Implementation System